

Rekayasa Model Korporatisasi Kelembagaan Petani Swadaya Melalui Kolaborasi Kemitraan Sertifikasi dan *IT Support System* untuk Mewujudkan Desa Mandiri Sawit

Budi Azwar¹, Fitra Lestari², Ahmad Hamdallah³, Masyhuri⁴, Aprijon⁵

^{1,3} Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Email: budi.azwar@uin-suska.ac.id, ahmad.hamdallah@uin-suska.ac.id

² Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Email: fitra.lestari@uin-suska.ac.id

³ Jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : masyhuri@uin-suska.ac.id

⁴ Jurusan Matematika, Fakultas Sain Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: aprijon@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Mengidentifikasi permasalahan kelembagaan pada organisasi inti (koperasi petani swadaya) saat ini sebagai landasan perbaikan dimasa mendatang dan Menganalisis bentuk kolaborasi kemitraan dan peran antar pemangku kepentingan dalam upaya penguatan lembaga petani swadaya. Implementasi model ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam upayanya meningkatkan produktivitas, saluran kerja sama dengan organisasi inti, kesetaraan harga TBS, transaksi perdagangan serta perbaikan pendapatan. Penelitian ini diawali dengan observasi untuk mengidentifikasi kondisi empiris praktik petani Swadaya dari perspektif Pelaku Usaha, pemerintah, dan Koperasi . Hasil identifikasi masalah dianalisis untuk merancang model integrasi manajemen kebijakan Petani Swadaya untuk mencapai Membangun sinergi kelembagaan antara pemerintah desa dengan organisasi inti dalam mendukung berbagai aktivitas administrasi dan manajemen kedua belah pihak. Metode yang digunakan adalah *Soft System Methodology (SSM)*. Data dikumpulkan melalui *Fokus Group Discussion (FGD)*, *In Depth Interview (IDI)* dan survei pakar. Model Integrasi Manajemen Kebijakan Petani Swadaya sebagai sistem manajemen *IT Supoort System* untuk Mewujudkan Desa Mandiri Sawit yang melibatkan stakeholder dalam perencanaan, yaitu pengawasan, pembinaan dan penindakan untuk minimalisasi konflik.

Kata Kunci: IT Supoort System, Strategi Assumption Surfacing and Testing (SAST) , ANP

ABSTRAK

The research objectives are to identify institutional problems in the current core organization (self-help smallholder cooperatives) as a basis for future improvements and to analyze forms of partnership collaboration and the role of stakeholders in efforts to strengthen independent smallholder institutions. The implementation of this model is expected to serve as a means in its efforts to increase productivity, expand channels of cooperation with core organizations, achieve FFB price equality, facilitate trade transactions, and improve income. This study begins with observations to identify the empirical conditions of the practice of independent smallholders from the perspective of business actors, government, and cooperatives. The results of the problem identification are analyzed to design an integrated model for independent smallholder policy management, achieving institutional synergy between the village government and core organizations in support of various administrative and management activities of both parties. The method used is Soft System Methodology (SSM). Data were collected through Focus Group Discussion (FGD), In-Depth Interview (IDI), and expert surveys. The Integrated Smallholder Policy Management Model is an IT support system to realize an Independent Oil Palm Village that involves stakeholders in planning, namely monitoring, coaching, and taking action to minimize conflict.

Keywords: *IT Support System, Strategy Assumption Surfacing and Testing (SAST) , ANP*

Pendahuluan

Sektor perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Hingga Tahun 2018, industri kelapa sawit telah memberikan sumbangan terbesar bagi peningkatan devisa negara melalui ekspor hingga mencapai angka US\$ 20,80 milyar (Kementan, 2019). Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga Tahun 2017, telah mencapai angka 16 juta hektar, dimana lebih dari 53% lahan

perkebunan kelapa sawit dikelola oleh masyarakat pedesaan secara swadaya (Gapki, 2018). Provinsi Riau merupakan wilayah sentra produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan kontribusi (*share*) produksi sebesar 22% dari total produksi kelapa sawit nasional (Kementan, 2019). Lebih jauh lagi, pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah pula memberikan dampak begitu besar terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian pedesaan di Indonesia (Syahza, 2011). Selama lebih dari satu dekade terakhir ini, sektor perkebunan kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang hidup dipedesaan. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit yang di kelola oleh petani secara swadaya. Disisi lain, pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah pula berhasil menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja di berbagai sektor, baik sektor perkebunan maupun agroindustri kelapa sawit.

Secara sosial, pengembangan industri kelapa sawit nasional sangat berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan (Purba dan Sipayung, 2017). Ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap hasil perkebunan kelapa sawit, telah menjadikan kelapa sawit sebagai sumber penghasilan utama bagi perekonomian dan kesejahteraan. Tingginya ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap hasil perkebunan kelapa sawit, dikhawatirkan dapat menyebabkan tingginya kerentanan nafkah rumah tangga masyarakat karena hanya mengharapkan dari satu sumber pendapatan. Akibatnya, jika terjadi gejolak harga sawit dapat menyebabkan masyarakat kehilangan banyak pendapatan seperti terjadi hingga saat ini (Hidayah *et al.*, 2016).

Permasalahan-permasalahan di atas umumnya dirasakan oleh para petani swadaya. Berangkat dari adanya rasa kesamaan nasib dan sekaligus dalam rangka mempertahankan eksistensi usaha yang telah mereka jalani, para petani swadaya membentuk atau menggabungkan diri dalam berbagai bentuk kelembagaan, baik yang bersifat informal seperti halnya kelompok usaha bersama (KUB), gabungan kelompok tani (gapoktan) ataupun menjadi anggota organisasi formal seperti halnya koperasi. Dengan bergabungnya petani swadaya kedalam suatu bentuk kelembagaan tersebut, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat seperti halnya berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan bibit kelapa sawit yang berkualitas, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka produktivitas perkebunan, peningkatan pendapatan melalui perbaikan harga serta berbagai manfaat lainnya. Namun demikian, upaya petani swadaya dalam peningkatan kesejahteraannya melalui keikutsertaan dalam suatu kelembagaan, tidak semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang mereka harapkan. Tidak jarang pula terjadi, organisasi yang telah mereka bangun secara swadaya tidak mampu berkembang dengan baik dan bahkan harus bubar dikarenakan berbagai faktor. Beberapa penyebab tidak berkembangnya organisasi seperti halnya koperasi swadaya kelapa sawit, diantaranya: 1) kurangnya kemampuan pengelolaan organisasi dari para pengurus, 2) kurangnya transparansi pengelolaan keuangan yang memicu terjadinya ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus, 3) proses administrasi dan birokrasi yang terkadang dirasa sangat menghambat upaya petani dalam memenuhi berbagai kebutuhan, serta 4) adanya tawaran yang lebih menjanjikan dari para pesaing, dalam hal ini para tengkulak yang umumnya lebih fleksibel dalam melakukan transaksi, penjualan dan pembayaran.

Permasalahan kelembagaan petani swadaya tersebut tentu pula ada berbagai penyebab yang melatarbelakanginya. Selain dikarenakan faktor-faktor internal yang ada dalam organisasi, kemungkinan lain dapat pula terjadi karena masih minimnya dukungan dari berbagai pihak dalam membantu pengembangan usaha organisasi seperti halnya koperasi petani swadaya kelapa sawit. Oleh karenanya, peran dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam rangka memperkuat keorganisasian dan kelembagaan petani swadaya yang ada. Sinergi antara pemangku kepentingan, sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi manfaat sesuai peran masing-masing. Kajian terkait rekayasa pengembangan korporatisasi organisasi petani swadaya ini berupaya memberikan suatu gagasan yang memungkinkan untuk diterapkan. Penguatan kelembagaan koperasi sebagai lembaga inti yang mendukung usaha perkebunan kelapa sawit petani swadaya ini, diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa agar mampu memanfaatkan potensi – potensi yang ada khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Dukungan bersama melalui kolaborasi dan kemitraan diharapkan dapat memberikan kontribusi terbentuknya koperasi petani swadaya yang dikelola secara profesional dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepercayaan (*trust*) dan manfaat yang lebih besar bagi perbaikan perekonomian petani swadaya dan masyarakat desa secara umumnya.

Kelembagaan Petani Swadaya dan Penguatannya

Kelembagaan pada hakekatnya diartikan sebagai hubungan peran dan tanggung jawab antar pihak terkait yang mencakup dua aspek penting, antara lain 1) norma dan konvensi (*norms and conventions*); dan 2) aturan (*rule of the game*). Kelembagaan terkadang disusun secara formal dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun juga terkadang tidak ditulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat (Arifin, 2005). Organisasi dilihat dari wujudnya, dipandang lebih bersifat konkrit dengan pengelolaan yang lebih modern (Syahyuti, 2002). Kelembagaan dipandang lebih bersifat tradisional dimana kelembagaan tidak memiliki anggota melainkan hanya terdiri dari pengikut. Sementara, organisasi dipandang lebih bersifat modern dan menjadi bagian dari suatu kelembagaan (Uphoff, 1986).

Korporasi Petani Swadaya Kelapa Sawit

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani telah menginisiasi suatu alternatif bentuk kelembagaan petani swadaya berupa organisasi berbadan hukum yang dikenal sebagai Korporasi Petani. Pembentukan model kelembagaan ini ditopang oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) aspek utama mencakup: 1) konsolidasi petani ke dalam Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum; 2) aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik; 3) aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern; 4) konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern; dan 5) aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi. Pembentukan model kelembagaan korporasi petani swadaya kelapa sawit ini didasarkan kepada kondisi eksisting petani yang cenderung kurang berkembang dengan tingkat efisiensi usaha sangat rendah serta manajemen usaha yang cenderung masih bersifat tradisional. Para petani swadaya yang berada di sisi hulu dalam rantai pasok agroindustri kelapa sawit, dalam menjalankan usahanya hanya, umumnya terfokus kepada aktivitas-aktivitas on-farm semata yang terkadang kurang memperhatikan mutu sesuai dengan permintaan perusahaan pengolahan kelapa sawit di sisi hilir. Oleh karenanya, perlu dilakukan konsolidasi petani agar mampu memperoleh efisiensi dalam mendapatkan berbagai sarana produksi dan pemasaran. Petani yang telah menggabungkan diri kedalam salah satu bentuk lembaga seperti KUB, Gapoktan ataupun koperasi dapat membentuk kelembagaan yang lebih besar berupa Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berupa koperasi atau badan usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

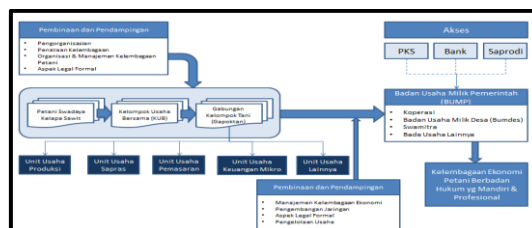
Korporasi Mandiri Petani Swadaya

Model kelembagaan petani swadaya yang saat ini relatif cukup berkembang adalah berbentuk koperasi mandiri. Namun demikian tidak semua wilayah mampu mengembangkan koperasi mandiri petani swadaya kelapa sawit. Umumnya koperasi mandiri swadaya kelapa sawit membangun model kelembagaan ini melalui proses dan waktu yang cukup panjang. Selain itu, petani-petani swadaya yang tergabung ke dalam model kelembagaan ini, mulai merintis bersama dari level kelembagaan terendah berupa KUB atau Gapoktan. Anggota yang terlibat umumnya memiliki rasa senasib sepenanggungan dan persaudaraan yang sangat kuat dikarenakan kebutuhan yang begitu besar sehingga mereka menggabungkan diri kedalam wadah koperasi mandiri tersebut.

Revitalisasi Asosiasi Petani Swadaya Kelapa Sawit

Salah satu organisasi atau lembaga yang juga memiliki kedekatan yang cukup erat dengan petani swadaya kelapa sawit adalah asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo). Saat ini keberadaannya cukup meluas bukan hanya di wilayah-wilayah pusat pemerintahan seperti halnya ibukota provinsi atau kabupaten, bahkan telah terbentuk hingga wilayah-wilayah kecamatan. Keberadaan lembaga ini juga merupakan suatu alternatif yang telah ditempuh oleh petani swadaya dalam berlembaga, terutama untuk mendapatkan kemudahan akses baik dalam pemenuhan kebutuhan usaha perkebunannya, ataupun dalam upaya mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam penerapan praktek perkebunan yang baik (GAP). Namun, saat ini fungsi Apkasindo masih terbatas kepada program serta aktivitas-aktivitas pembinaan, pelatihan ataupun capacity building bagi para anggotanya. Berbagai permasalahan mendasar yang juga dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja petani swadaya antara lain dalam mediasi persoalan legalitas lahan atau produk pertaniannya serta sertifikasi usaha perkebunan yang diharapkan dapat menjadi penjamin dan memberikan kepercayaan perusahaan pengolahan kelapa sawit di sisi hilir. Selain itu pula, Apkasindo masih bersifat asosiasi dimana keanggotaannya masih bersifat sukarela dan tidak semua petani swadaya bersedia bergabung kedalam asosiasi tersebut.

Oleh karenanya, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mengikat dan memberikan dampak atau manfaat yang lebih tepat sasaran, keberadaan Apkasindo sebagai wadah bergabungnya para petani swadaya perlu direvitalisasi melalui peraturan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini berguna sebagai landasan berpijak terlaksananya program yang lebih luas dalam rangka penguatan kelembagaan petani swadaya secara lebih nyata.



Gambar 1. Diagram sistematika penguatan kelembagaan petani swadaya

Konsep Desa Mandiri

Masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan kelapa sawit, umumnya melakukan pengelolaan perkebunan secara swadaya. Menjadi petani secara swadaya merupakan alternatif terakhir yang ditempuh masyarakat mengingat beberapa keuntungan yang dapat mereka peroleh, diantaranya: 1) dapat

mengelola perkebunan secara mandiri tanpa harus bergantung dengan pihak lainnya, 2) dapat melakukan transaksi dengan pihak manapun dimana harga menjadi faktor utama dalam pemilihan pasar sasaran penjualan hasil perkebunan kelapa sawit, dan 3) dapat menikmati hasil perkebunan kelapa sawit sendiri tanpa harus terikat dengan target produksi dari pihak manapun. Meskipun demikian, berbagai persoalan juga dihadapi para petani swadaya kelapa sawit, diantaranya: 1) minimnya pengetahuan terkait budidaya dan praktek perkebunan yang baik (*good agriculture practice*) serta penerapan pasca panen, yang mengakibatkan rendahnya mutu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan, 2) daya tawar petani swadaya kelapa sawit semakin rendah dari akibat rendahnya mutu TBS yang dihasilkan, 3) minimnya akses informasi dan pendanaan dalam upaya pengembangan usaha perkebunan, serta 4) masih minimnya dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi dalam memberikan bantuan pembinaan dan pendampingan.

Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia

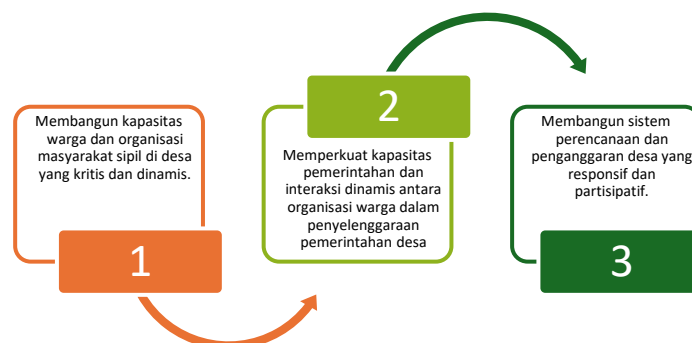
Suatu desa berfungsi untuk permukiman masyarakat dengan penduduknya memiliki berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Destifani dkk, (2013) menyatakan bahwa aktivitas desa terdiri dari kumpulan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus kebutuhan masyarakatnya berdasarkan kebiasaan dan budaya yang diakui dalam system pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten. Sehingga, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah dengan melakukan pembagian daerah wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Ini bertujuan memaksimalkan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat dalam kehidupan keseharian. Sehingga, pemerintah dapat meningkatkan fungsinya dengan memberikan kewenangan subsidiaritas untuk membantu dan memfasilitasi, masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa.

Desa Mandiri

Pondasi pembangunan desa terletak pada kewenangan pengelolaan desa. Desa mandiri diartikan sebagai kewenangan dan tanggungjawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa (Sukasmanto dan Mariana 2015). Oleh karena itu desa mandiri merupakan fondasi atau dasar sehingga perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga desa dapat menjadi kokoh dan tangguh (Eko 2014) kemandirian desa memiliki beberapa ciri:

1. Kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
2. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran satu desa satu perencanaan, sebagai acuan seluruh program pembangunan di desa dan dijalankan secara konsisten.
3. Sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya.
4. Sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Tujuan akhir desa mandiri adalah masyarakat sendiri dapat mengelola pembangunan desanya sesuai kewenangannya sehingga dapat memberikan keleluasaan bertindak untuk memenuhi kepentingan masyarakat sendiri (Nain, 2019). Kemudian, perwujudan kemandirian desa dilakukan melalui beberapa strategi (Kurniawan, 2015)



Gambar 2. Strategi kemandirian desa

Kebijakan pembangunan nasional memberi peluang bagi kelompok masyarakat menuju desa mandiri. Sehingga, perwujudan membangun desa mandiri dapat dilakukan dengan melaksanakan strategi kearifan lokal dan sinergitas dengan pemerintah dalam desa membangun. Adanya desa mandiri diharapkan dapat mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa. Kemudian, adanya kewenangan menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Sehingga, dibutuhkannya pemberdayaan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Pada akhirnya

kesuksesan pencapaian desa mandiri mesti ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.

Sistem Informasi Manajemen dalam Penguatan Kelembagaan Desa

Salah satu peran sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi adalah dalam hal pengumpulan data yang bisa dilakukan secara cepat, akurat dan berkualitas. Secara umum, sistem informasi manajemen memiliki tiga peran utama dalam sebuah organisasi, yaitu 1. Mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional, 2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen, 3. Mendukung persaingan keuntungan strategis. Menurut Gordon (1984) bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah kesatuan sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasional, manajemen dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi.



Gambar 3. Relasi dua arah antara organisasi dan teknologi informasi

Metode Penelitian

Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Desa Beringin Indah berada lebih kurang 75 km dari Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau. Terpilihnya lokasi kegiatan ini sebagai sasaran pengembangan dalam kegiatan ini, dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain.

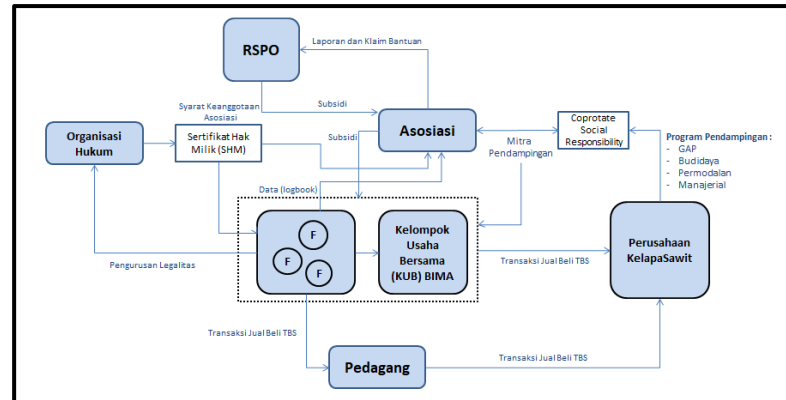
1. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah potensial perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai angka 393.330 hektar (BPS, 2019).
2. Adanya upaya pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai kawasan teknopolitan khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit.
3. Lebih spesifik, kegiatan akan difokuskan pada salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bima yang berdomisili di Desa Beringin Indah Kabupaten Pelalawan. Pada wilayah tersebut perkebunan petani swadaya telah terklasterisasi dalam suatu wilayah sehingga akan memudahkan dalam proses pengelolaan.
4. Sebagian petani swadaya anggota KUB Bima telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan standar sertifikasi RSPO perkebunan kelapa sawit dari Asosiasi Petani Swadaya Siak-Pelalawan yang telah pula membangun kerja sama dengan beberapa perusahaan kelapa sawit di sekitar Kabupaten Pelalawan. Melalui kegiatan kegiatan ini diharapkan akan semakin banyak bertambah petani-petani swadaya di Desa Beringin Indah yang mendapatkan program pendampingan terkait kebutuhan-kebutuhan sertifikasi.

Kerangka Pemikiran

Menjadi petani swadaya merupakan salah satu profesi yang banyak digeluti masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini. Begitu juga halnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Namun dikarenakan berbagai keterbatasan dan kondisi yang ada, hingga saat ini petani swadaya masih berada dalam posisi lemah dibandingkan para pelaku usaha lainnya dalam lingkup rantai pasok kelapa sawit.

Upaya untuk mendukung dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani swadaya kelapa sawit mesti dilakukan, salah satunya melalui pembentukan kelembagaan ataupun penguatan terhadap organisasi dan kelembagaan yang telah eksis. Upaya penguatan kelembagaan petani swadaya tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak sesuai dengan peran masing-masing, baik dari kalangan pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi petani swadaya kelapa sawit ataupun dari kalangan perguruan tinggi. Melalui sinergi bersama antar peran yang dituangkan kedalam suatu program nyata, diharapkan dapat terwujud suatu lembaga

petani swadaya kelapa sawit yang kuat dan mampu menjadi organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani swadaya khususnya dan perbaikan ekonomi desa secara umumnya.

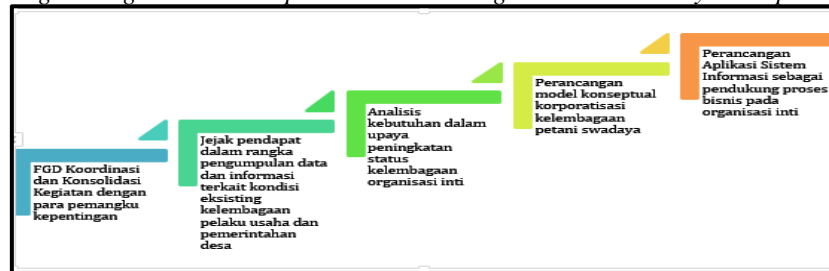


Gambar 4. Rancangan konseptual penguatan kelembagaan petani swadaya

Tahapan Kegiatan

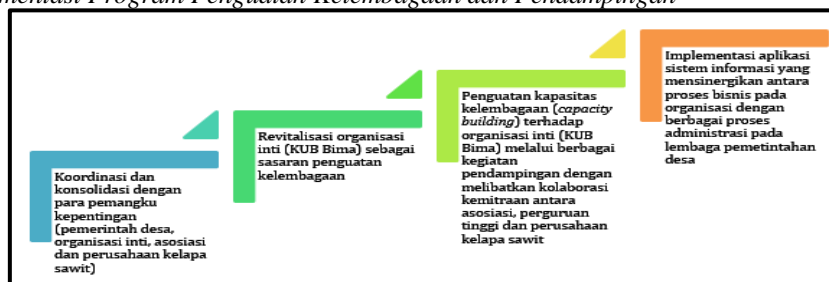
Secara umum kegiatan pengabdian masyarakat terkait rekayasa korporatisasi kelembagaan petani swadaya melalui kolaborasi kemitraan sertifikasi RSPO dan *IT Support System* untuk mewujudkan desa mandiri sawit ini, terbagi kedalam dua kelompok kegiatan utama, yakni kegiatan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan dalam bentuk pengembangan. Kedua kegiatan memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya, dimana hasil kegiatan awal yang akan dilaksanakan akan menjadi landasan dalam pengimplementasian program penguatan kelembagaan petani swadaya melalui kolaborasi kemitraan yang didukung dengan ketersediaan system informasi manajemen (*IT Decision Support System*). Secara lebih terinci, tahapan-tahapan yang akan dalam kegiatan ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Riset Pengembangan Model Korporatisasi Kelembagaan Petani Swadaya Kelapa Sawit



Gambar 5. Tahapan riset pengembangan model korporatisasi kelembagaan petani swadaya

b. Implementasi Program Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan



Gambar 6. Tahapan implementasi model korporatisasi kelembagaan petani swadaya

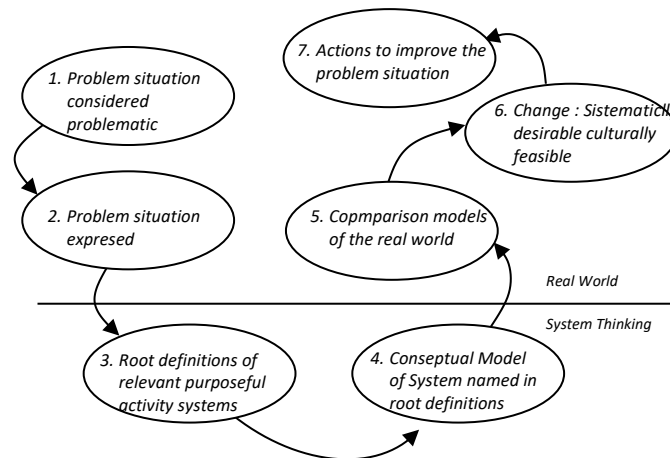
Metode Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang terbagi menjadi 2 kelompok kegiatan utama, yakni riset pengembangan model korporatisasi kelembagaan petani swadaya serta implementasi korporatisasi kelembagaan dalam rangka mewujudkan desa mandiri kelapa sawit ini, maka metode pelaksanaan juga dibagi menjadi 2 metode, sebagai berikut :

Soft System Metodologi (SSM)

Soft System Methodology (SSM) pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Peter Checkland di Universitas Lencaster, UK (Mahregan *et al*, 2012). SSM merupakan sebuah pendekatan dalam suatu kajian yang bersifat sistemik melalui penggunaan model-model sistem (Checkland and Scholes, 1990). SSM dapat memberikan teknik kunci dan teori dasar yang penting untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu

permasalahan dan sekaligus menelusuri relevansi antar hubungan komponen-komponen sistem dalam suatu konseptualisasi yang lebih luas (Bunch, 2003). *Soft System Methodology* (SSM) merupakan pendekatan sistematis dengan menerapkan 7 langkah analisis, mulai dari pengidentifikasian permasalahan kelembagaan dan desa hingga rencana aksi penerapan model kelembagaan yang dibangun. Adapun tahapan-tahapan penting SSM dapat diuraikan seperti tersaji pada Gambar 9, (Checkland and Scholes, 1990):



Gambar 7. Tahapan Soft System Methodology (SSM)

Participatory Action Research (PAR)

Parcipatory Action Research (PAR) merupakan kegiatan riset atau kegiatan yang dilaksanakan secara partisipatif pada suatu kelompok masyarakat tertentu dalam upaya mendorong terjadinya aksi dan perubahan secara mandiri di masyarakat. Berbeda dengan bentuk kegiatan pada umumnya, pada kegiatan PAR peneliti terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan guna mendapatkan pengetahuan mendalam permasalahan kelambagaan yang dialami di masyarakat sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu strategi perubahan terhadap sasaran pengembangan, dalam hal ini adalah yang mengarah kepada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi inti yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian pedesaan.

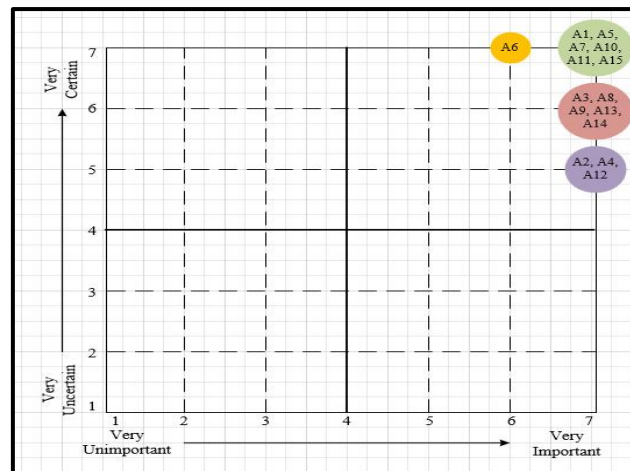
Pada kegiatan PAR berbagai aspek penting dicoba untuk dikolaborasikan dan disinergikan menjadi satu kesatuan rencana aksi perubahan. Aspek-aspek penting yang menjadi fokus perubahan pada kegiatan PAR, antara lain : a) sosial, budaya, c) ekonomi, d) hokum dan politik serta e) teknologi.

Metode ANP dan SAST

Metode SAST (Mason dan Mitroff, 1981) untuk memunculkan dan menguji asumsi strategis yang merupakan kondisi ideal atau prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem. Selain itu, juga digunakan metode ANP (Saaty, 2003) untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap sistem outsourcing dalam perspektif hubungan industrial.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil pemunculan (surfacing) dan pengujian (Testing) asumsi tersebut sesuai metode SAST. diperoleh tingkat kepastian dan kepentingan asumsi. penentuan asusmsi strategis digambarkan dalam kuadran kartesius, dimana kuadran I untuk rencana yang pasti sebagai penggerak keberhasilan model kebijakan . Dengan adanya asumsi strategis ini model yang dirancang dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan hubungan industrial yang harmonis dan menjadikan petani swadaya yang mandiri. Asumsi-asumsi pada kuadran I yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat kepastian paling tinggi dengan nilai 7.7 (amat sangat penting-amat sangat pasti), yaitu : A1, A5, A7, A10, A11, A15.



Gambar 8. Pemeringkatan asumsi strategis dengan teknik SAST

Penentuan tingkat kepentingan dan kepastian dari masing-masing asumsi dilakukan dengan mencari nilai modus dari setiap penilaian responden terhadap asumsi-asumsi yang ada, dalam pembuatan grafik, terdapat 4 pembagian kuadran dengan rincian very important, very certain, very unimportant, dan very uncertain. Hasil penilaian keseluruhan responden menunjukkan asumsi A1, A5, A7, A10, A11 dan A15 memiliki tingkat kepentingan dan tingkat kepastian sebesar tujuh (7,7) atau berada pada kuadran 1, hal ini menandakan asumsi tersebut merupakan kondisi yang paling ideal atau prasyarat mutlak untuk meningkatkan kinerja rantai pasok kelapa sawit, selanjutnya disusul dengan asumsi A3, A8, A9, A13, dan A14 yang memiliki tingkat kepentingan 7 serta tingkat kepastian 6 (7,6), lalu asumsi A2, A4, dan A12 pada koordinat (7,5). Pada tingkat kepentingan 6 dan kepastian 7 (6,7) terdapat 1 asumsi yakni A6 yang menjadi strategi dalam peningkatan kinerja rantai pasok kelapa sawit. Gambar 1 menampilkan peringkat ataupun posisi dari 15 asumsi dalam kuadran, asumsi dengan nilai (7,7) menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan penelitian, asumsi tersebut ialah A1, A5, A7, A10, A11, A15. Selanjutnya disusul dengan tingkat kepentingan 7 dan tingkat kepastian 6, asumsi dengan tingkat (7,6) yang berada pada kuadran 1 merupakan asumsi prioritas usulan kedua setelah tingkat kepentingan dan kepastian (7,7), adapun asumsi yang dimaksud pada tingkat (7,6) ialah A3, A8, A9, A13, A14.

Tabel 1. Mapping SAST dan rekomendasi

No	Mapping SAST	Rekomendasi
1	A1, A5, A7, A10, A11, A15	Mengutamakan penguatan kelembagaan dalam bentuk kemitraan dan sertifikasi ISPO/RSPO dan bekerjasama dengan pemerintah setempat.
2	A3, A8, A9, A13, A14	Penguatan alur proses penjualan TBS antara petani swadaya, peron, dan PKS
3	A2, A4, A12	Ketetapan harga TBS yang mudah di akses dengan teknologi oleh petani swadaya

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu di temukan 15 asumsi strategi untuk peningkatan kinerja petani sawit swadaya, *adanya 6 asumsi yang critical dalam pengembangan petani swadaya sawit meliputi A1, A5, A7,A10, A11,A1*, hasil perhitungan 40% asumsi significant untuk peningkatan kinerja petani swadaya.

Daftar Pustaka

- [1] Arifin B. 2005. Ekonomi Kelembagaan Pangan. Jakarta (ID) : Pustaka LP3ES Indonesia.
- [2] Bunch MJ. 2003. Soft Systems Methodology and the Ecosystem Approach: A System.
- [3] Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2019.
- [4] Checkland and Scholes, 1990. Soft System Methodology in Action. Wiley.
- [5] Eriyatno, 2012. Ilmu Sistem, Meningkatkan Integrasi dan Koordinasi Manajemen. Jilid 2. Guna Widya

- Bogor Indonesia.
- [6] Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
 - [7] GAPKI. 2018. Peran Strategis Sawit Rakyat Indonesia. <https://gapki.id/news/3875/peran-strategis-sawit-rakyat-indonesia> (Diakses: 5 Oktober 2021).
 - [8] Hidayat, N. Dharmawan, AH. Barus, B. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 256-256.
 - [9] Kementrian Pertanian. 2019. *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit*.
 - [10] Kurniawan, B. 2019. *Desa Mandiri Desa Membangun: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Buku 5. Jakarta.
 - [11] Naim, U. 2019. *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Cetakan Pertama. Garis Katuistiwa, Makasar.
 - [12] Mahregan MR, Hosseinzadeh M, Kazemi A. 2012. An aplication of soft system methodology. *Proc. Soc. Behav. Sci.* 41: 426:433.
 - [13] Purba, JVC dan Sipayung, T. 2017. *Mitos Vs Fakta Industri Minyak Sawit dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global*. Agribusines Strategic Policy Institut (PASPI). Bogor, Indonesia.
 - [14] Purnomo, H. 2012. *Pemodelan dan Simulasi untuk Pengelolaan Adaptif Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. IPB Press. Bogor Indonesia.
 - [15] Sukasmanto dan Mariana, Dina. 2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
 - [16] Syahyuti. 2002. *Kelembagaan dan keorganisasian pertanian. Konsep, hasil-hasil kegiatan, dan strategi pengembangannya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Indonesia.
 - [17] Syahza, A. 2012. Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12 (2): 297-310.
 - [18] Uphoff, N. 1986. *Local Institution Development*. West Hartford (US) : CT. Kumarian Press.